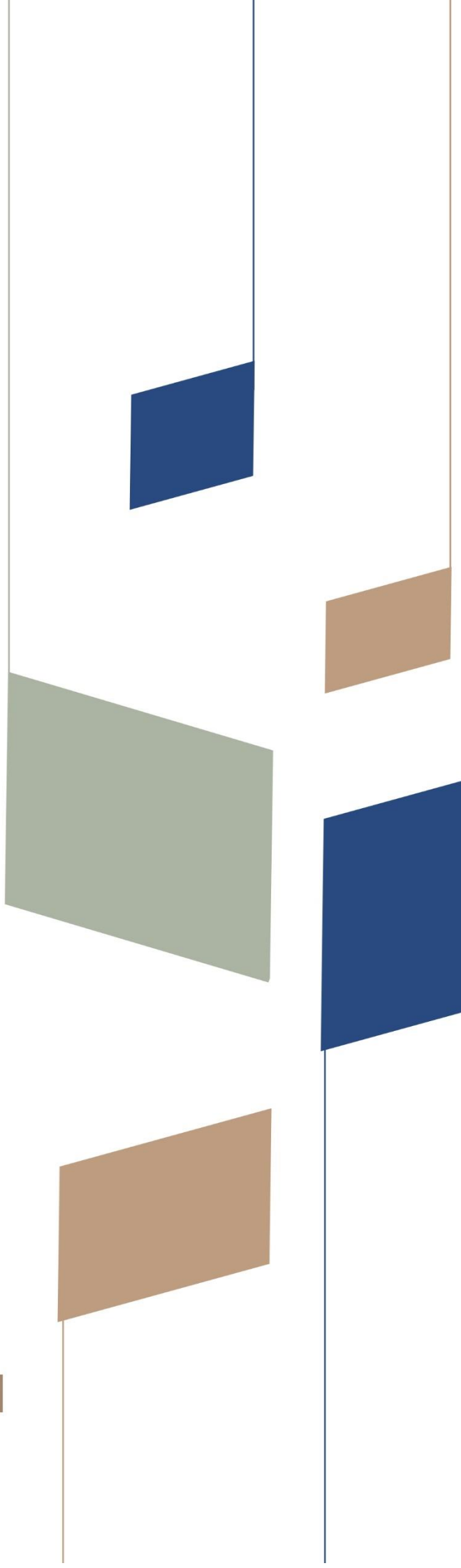


TAHUN 2024

**RANCANGAN AWAL  
RENCANA KERJA  
(RANWAL RENJA)**

DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan penyertaan-Nyalah, Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu ini dibuat secara berkesinambungan setiap tahunnya, dengan maksud untuk menjamin agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas yang akan dicapai pada tahun berikutnya.

Rancangan Rencana Kerja ini merupakan wujud pelaksanaan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika selama 1 (satu) tahun yang akan dicapai pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.

Sebagai rencana kerja yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan rancangan rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2024, diharapkan rencana kerja ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang akan dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2024.

Kami menyadari terdapat kekurangan pada penyusunan rencana kerja ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan rencana kerja ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan memberikan kontribusi yang positif dalam penyusunan laporan ini. Semoga bermanfaat bagi kalangan luas, terutama pihak-pihak terkait.

Pasir pengaraian, Januari 2023  
Kepala Dinas  
Dinas Komunikasi dan Informatika

**H. SYOFWAN, S.Sos**  
**NIP. 19661113 198603 1 004**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI           DAN INFORMATIKA KABUPATEN ROKAN HULU           TAHUN LALU .....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.....	8
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN           INFORMATIKA KABUPATEN ROKAN HULU .....</b>	<b>22</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu .....	23
3.4 Program dan Kegiatan .....	25
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>41</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA

SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Pentingnya perencanaan pembangunan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu merupakan unsur pelaksana dan pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu. Adapun tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu adalah :

- a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang E-Government dan SPBE, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang E-Government dan SPBE, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan komunikasi publik, Bidang E-Government dan SPBE, Bidang Statistik, dan Bidang

Persandian;

- d. pelaksanaan administrasi pada sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang E-Government dan SPBE, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tahapan Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

**A. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja**

- 1. Menyusun rancangan sebuah keputusan dari Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja
- 2. Melakukan orientasi tentang Renja Perangkat Daerah
- 3. Menyusun Agenda Kerja dari Tim Penyusunan Renja
- 4. Mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

**B. Penyusunan Rancangan Awal Renja dari Perangkat Daerah**

- 1. Pendahuluan;
- 2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
- 3. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- 4. Rencan Kerja dan pendanaan perangkat daerah
- 5. Penutup
- C. Menyusunan Rancangan Renja dari Perangkat Daerah
- D. Forum Perangkat Daerah dan antar lintas Perangkat Daerah
- E. Perumusan Akhir Renja
- F. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang

dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan menuju Rokan Hulu Maju dan Terdepan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pertimbangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu



### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 adalah menetapkan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing yang emban oleh seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinat, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan rencana kerja:

- a. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang penyusunannya melibatkan Sekretariat dan seluruh Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Awal Renja Kerja (Ranwal Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu untuk periode 1 (satu) tahun;
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Akuntabilitas Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu (Inpres Nomor 7 Tahun 1999).

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN ROKAN  
HULU TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN ROKAN HULU**

- 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu
- 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu
- 3.4 Program dan Kegiatan

**BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu**

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk

pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2022 memuat 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2022 berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp. **10.248.232.111,-** terealisasi pada triwulan IV sebesar Rp. **9.847.639.242.-** terserap sekitar 96,09% sebagaimana Realisasi Fisik Keuangan (RFK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Desember Tahun 2022 Sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/kegiatan dan Sub kegiatan Diskominfo Tahun Anggaran 2022**

No	Badan /Dinas/Kantor/Bagian Nama Kegiatan PPTK	Jumlah Dana (Pagu Dana) (Rp.)	Bobot	Realisasi						SiLPA	Nama Direktur/Perusahaan/Nilai Tgl. Kontrak/Masa Kontrak	Lokasi Kegiatan	KET / KENDALA
				Fisik		Keuangan							
				(%)	Tertimbang (%)	SP2D/ NPD (Rp.)	(%)	SPJ(Rp.)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>													
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,053,072,692.00	20.03	100	20.04	1,830,499,448.00	89.16	1,830,499,448.00	89.16	222,573,244			
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69,114,000.00	0.67	100	0.67	69,114,000.00	100	69,114,000.00	100	0			
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124,362,600.00	1.21	100	1.21	124,153,400.00	99.83	124,153,400.00	99.83	209,200			
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190,383,400.00	1.86	100	1.86	190,383,400.00	100	190,383,400.00	100	0			
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62,298,500.00	0.61	100	0.61	62,298,500.00	100	62,298,500.00	100	0			
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273,259,979.00	2.67	100	2.67	273,228,779.00	99.99	273,228,779.00	99.99	31,200			
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,010,000.00	0.04	100	0.04	4,010,000.00	100	4,010,000.00	100	0			

No	Badan /Dinas/Kantor/Bagian Nama Kegiatan PPTK	Jumlah Dana (Pagu Dana) (Rp.)	Bobot	Realisasi						SiLPA	Nama Direktur/Perusahaan/Nilai Tgl. Kontrak/Masa Kontrak	Lokasi Kegiatan	KET / KENDALA
				Fisik		Keuangan							
				(%)	Tertimbang (%)	SP2D/ NPD (Rp.)	(%)	SPJ(Rp.)	(%)				
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,658,180.00	0.61	100	0.61	48,431,165.00	77.29	48,431,165.00	77.29	14,227,015			
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265,225,200.00	2.59	99.99	2.59	264,739,200.00	99.82	264,739,200.00	99.82	486,000			
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90,548,200.00	0.88	100	0.88	90,548,200.00	100	90,548,200.00	100	0			
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133,665,860.00	1.3	99.99	1.3	133,370,650.00	99.78	133,370,650.00	99.78	295,210			
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,000,000.00	0.73	100	0.73	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	0			
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>												
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>												
13	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	77,500,000.00	0.76	100	0.76	77,500,000.00	100	77,500,000.00	100	0			

No	Badan /Dinas/Kantor/Bagian Nama Kegiatan PPTK	Jumlah Dana (Pagu Dana) (Rp.)	Bobot	Realisasi						SiLPA	Nama Direktur/Perusahaan/Nilai Tgl. Kontrak/Masa Kontrak	Lokasi Kegiatan	KET / KENDALA
				Fisik		Keuangan							
				(%)	Tertimbang (%)	SP2D/ NPD (Rp.)	(%)	SPJ(Rp.)	(%)				
14	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	624,100,000.00	6.09	100	6.09	622,900,000.00	99.81	622,900,000.00	99.81	1,200,000			
15	Layanan Hubungan Media	3,310,358,000.00	32.3	98.19	31.72	3,249,408,000.00	98.16	3,249,408,000.00	98.16	60,950,000			
16	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	70,300,000.00	0.69	100	0.69	70,300,000.00	100	70,300,000.00	100	0			
17	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	791,770,000.00	7.73	100	7.73	788,199,000.00	99.55	788,199,000.00	99.55	3,571,000			
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>												
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>												
18	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,440,000,000.00	14.05	93.33	13.11	1,344,000,000.00	93.33	1,344,000,000.00	93.33	96,000,000			
19	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	530,605,500.00	5.18	100	5.18	529,555,500.00	99.8	529,555,500.00	99.8	1,050,000			
	<b>JUMLAH / PERSENTASE</b>	<b>10,248,232,111.00</b>			<b>98.49</b>	<b>9,847,639,242.00</b>	<b>96.09</b>	<b>9,847,639,242.00</b>	<b>96.09</b>	<b>400,592,869.00</b>			
	<b>Sisa UP/GU/TU</b>					<b>253,500.00</b>							

No	Badan /Dinas/Kantor/Bagian  Nama Kegiatan  PPTK	Jumlah Dana  (Pagu Dana)  (Rp.)	Bobot	Realisasi						SiLPA	Nama  Direktur/Perusahaan/Nilai  Tgl. Kontrak/Masa  Kontrak	Lokasi Kegiatan	KET /  KENDALA
				Fisik		Keuangan							
				(%)	Tertimbang (%)	SP2D/ NPD (Rp.)	(%)	SPJ(Rp.)	(%)				
	JUMLAH DANA SATKER	10,248,232,111.00	100		98.49	9,847,892,742.00	96.09	9,847,639,242.00	96.09	400,592,869.00			



Tabel 2.2

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)\***

**Provinsi Riau  
Kabupaten Rokan  
Hulu**

OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak									
2	16	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	75	100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					<b>100</b>	<b>75</b>	<b>100</b>		<b>100</b>				
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100			100		
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100			100		
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100			100		
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100			100		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	0	100			100		
2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100			100		
2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100			100		
2	16	2		<b>Program Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>Anugerah Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>Informatif</b>	<b>Menuju Informatif</b>	<b>Menuju Informatif</b>			<b>Informatif</b>		
					<b>Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>68,75</b>			<b>87,5</b>		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Persentase aduan masyarakat terlayani	100	100	100			100		
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100			100		
2	16	3		<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE</b>	100	34,48	51,72			86,2		
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	100	100	100			100		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90	50	60			70		
					persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu	100	30	50			80		
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu	100	29	100			100		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	30	60			70		
2	20			<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>									
2	20	2		<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Data/informasi/statistik yang terintegrasi</b>	<b>ada</b>	<b>-</b>	<b>ada</b>			<b>ada</b>		
					<b>Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100			100		
2	20 02	2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	-	60			70		
2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Ke- giatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	21	2		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	60	20	30			40		
2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	60	20	30			40		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ROKAN HULU**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran nan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka visi presiden tahun 2020-2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,  
MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG  
ROYONG”**

Berdasarkan lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Secara rinci sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU cipta lapangan kerja. Kedua, UU pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritas investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arah kebijakan umum nasional di bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan 2 (dua) program strategis nasional, yaitu:

1. Menyediakan layanan publik dan pemerintahan berbasis teknologi informasi.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Program strategis nasional tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ROKAN HULU**

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran yang akan

dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika secara keseluruhan.

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**

**Target dan Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2022**

Jenis Pelayanan	Indikator	Target Nasional		Target SPM 2021	Realisasi / Capaian 2021	Target SPM 2022	Realisasi/ Capaian 2022
		%	%	%		%	%
Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui;						
	a) Media masa seperti Surat Kabar Harian	100	100	100	100	100	100
	b) Media baru seperti website (media <i>online</i> )	100	100	100	100	100	100
	c) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	100	100	100	100	100	100
	d) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	100	100	100	100	100	100
	e) Media luar ruang seperti TVC Antara, brosur, spanduk dan baliho	100	100	100	100	100	100
	f) Media Radio Swara Lima Luhak	100	100	167	167	100	167
Pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	70	70	31,25	31,25	70	31,25

**3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024**

Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 disusun Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2026 yakni mewujudkan ***“Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang lebih maju dan berdaya saing dalam keragaman Adat dan Budaya berdasarkan nilai nilai Agama menuju masyarakat sejahtera”***.

Untuk mewujudkan dan merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi perlu diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan tahunan organisasi agar tercapai tujuan organisasi, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2024 dan perkiraan maju Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana terlampir.

**Tabel 3.2**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Kerja Tahun 2024		Perkiraan maju rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Tahun 2024		Tahun 2025			
									Target	Rp	Target	Rp		
	1			2	3	4	5	10	11	12	13	18		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.543.957.000		11.794.577.570	Dinas Komunikasi dan Informatika		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.543.957.000		11.794.577.570	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.543.957.000		11.794.577.570	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen		100 persen	9.948.957.000	100 persen	9.979.577.570	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	36.000.000	Persen	36.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	-	4	12.000.000	4	12.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	4	12.000.000	4	12.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	-	16	12.000.000	16	12.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		100 persen	1.946.984.290	100 persen	2.139.682.719	Dinas Komunikasi

Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Kerja Tahun 2024		Perkiraan maju rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2024		Tahun 2025		
										Target	Rp	Target	Rp	
													dan Informatika	
	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	-	14	1.926.984.290	14	2.119.682.719	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapoaran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	2	10.000.000	1	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	1	10.000.000	1	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>		<b>100 persen</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>40.000.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	-	-	0	-	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	-	5	40.000.000	5	40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>		<b>100 persen</b>	<b>598.282.429</b>	<b>100 persen</b>	<b>864.666.147</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	12	44.999.900	12	44.999.900	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	-	12	88.505.800	37	354.889.518	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Kerja Tahun 2024		Perkiraan maju rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2024		Tahun 2025		
										Target	Rp	Target	Rp	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	-	12	79.946.650	12	79.946.650	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	-	12	39.544.100	12	39.544.100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	-	2	10.000.000	2	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	-	100	335.285.979	100	335.285.979	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>		<b>100 persen</b>	<b>730.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>-</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	1	550.000.000	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	0	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	-	-	0	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	2	180.000.000	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>		<b>100 persen</b>	<b>1.347.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.347.000.000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	-	2	10.000.000	2	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	



Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Kerja Tahun 2024		Perkiraan maju rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2024		Tahun 2025		
										Target	Rp	Target	Rp	
	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	-	3	50.000.000	3	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	-	1	1.254.000.000	1	1.254.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	12	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>		<b>100 persen</b>	<b>304.100.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>314.600.000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	-	1	46.000.000	1	46.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara yang dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	-	6	115.000.000	6	115.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	-	1	180.000.000	1	185.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	180.000.000	1	185.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	180.000.000	1	185.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Anugerah Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>Predikat</b>	<b>Cukup Informatif</b>	<b>Informatif</b>	<b>3,837,800,000</b>	<b>Informatif</b>	<b>4,687,800,000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
							<b>Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</b>	<b>Persen</b>	<b>31,25</b>	<b>87,5</b>	<b>193,600,000</b>	<b>93,75</b>	<b>212,960,000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>

Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Kerja Tahun 2024		Perkiraan maju rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2024		Tahun 2025		
										Target	Rp	Target	Rp	
						Persentase aduan masyarakat terlayani	Persen	100	100	145,200,000	100	159,720,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		100	4,176,600,000	100	5,060,479,905	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	-	12	17,000,000	12	19,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	-	12	17,000,000	12	19,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	100	1,000	100,000,000	1,000	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	10	2	250,000,000	2	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	10	6	532,000,000	6	312,479,905	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	91	100	3,000,000,000	100	4,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	12	3	30,000,000	3	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01	09	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	12	6	50,000,000	6	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01	10	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	10	2	30,000,000	2	30,000,000	Dinas Komunikasi	

Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Kerja Tahun 2024		Perkiraan maju rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2024		Tahun 2025		
										Target	Rp	Target	Rp	
													dan Informatika	
	2	16	03	2.01	11	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	10	2	100,000,000	2	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE</b>	Persen	24,14	86,2	3,033,266,812	100	2,368,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	Persen	100	100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
							Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	50	70		80		Dinas Komunikasi dan Informatika
							persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu	Persen	-	80		90		Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu</b>	Persen	55	100	1,906,000,000	100	1,906,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	2	10,000,000	2	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	45	29	1,896,000,000	29	1,896,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Kerja Tahun 2024		Perkiraan maju rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Tahun 2024		Tahun 2025			
									Target	Rp	Target	Rp		
	2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>70</b>	<b>1,127,266,812</b>	<b>80</b>	<b>462,000,000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	
	2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	2	12,000,000	2	12,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	1	393,000,000	1	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	16	2	80,000,000	2	80,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	14	2	632,266,812	2	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	10	2	10,000,000	2	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>ada</b>	<b>90.000.000</b>	<b>ada</b>	<b>90.000.000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
	2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Data/informasi/ statistik yang terintegrasi</b>	<b>Ketersediaan</b>	<b>Ada</b>	<b>ada</b>	<b>211,200,000</b>	<b>ada</b>	<b>232,320,000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
							<b>Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
							<b>Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>

Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Kerja Tahun 2024		Perkiraan maju rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2024		Tahun 2025		
										Target	Rp	Target	Rp	
						daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah								
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen		70	211,200,000	90	232,320,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	4	1	132,000,000	1	145,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	10	2	13,200,000	2	14,520,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	4	2	49,500,000	2	54,450,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	10	2	16,500,000	2	18,150,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				40	45,000,000	50	220,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	17,24	40	45,000,000	50	220,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah			40	45,000,000	50	220,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	10	-	-	2	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Kerja Tahun 2024		Perkiraan maju rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2024		Tahun 2025		
	Target	Rp	Target	Rp										
	2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	10	2	45,000,000	2	205,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, pagu anggaran dan sumber dana yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Ranwal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 terdapat 5 (lima) program, 12 (tujuh belas) kegiatan dan 51 (empat puluh dua) Sub Kegiatan baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator

kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2024 :

## **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

### **a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

### **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

### **d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
  - Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
  - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
  - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - Pelayanan Informasi Publik
  - Layanan Hubungan Media
  - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### **III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

#### **a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

#### **b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

### **IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

#### **a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

## **V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

### **a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu yang disusun secara tahunan ini agar dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak dan tersedianya anggaran memadai. Adanya renja ini diharapkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan prima yang bersifat cepat, akurat dan transparan.

Rokan Hulu, Februari 2023  
**KEPALA DINAS,**

**H. SYOFWAN, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19661113 198603 1 004